



Analisis Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Di Kabupaten Sijunjung

Bella Ratu Pratiwie¹⁾, Widya Fitriana²⁾, Zednita Azriani³⁾

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding author: bellaratupratiwie@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengembangan kawasan strategis pariwisata dan dampaknya di Kabupaten Sijunjung. Penelitian dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya citra Kecamatan Sijunjung sebagai kawasan strategis pariwisata sehingga manfaat pengembangannya belum dirasakan secara optimal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengembangan kawasan strategis pariwisata berdasarkan komponen pariwisata, zonasi wilayah, dan pengembangan desa wisata, serta menganalisis dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif, dengan melibatkan 135 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata Sijunjung memiliki daya tarik wisata yang beragam, tetapi masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas, sarana penunjuk arah, transportasi umum, dan amenities pendukung. Dari perspektif tata kelola, pengembangan kawasan memerlukan penguatan koordinasi kebijakan, pengelolaan destinasi, dan pelibatan masyarakat agar pengembangan pariwisata dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan persepsi masyarakat, dampak paling tinggi terdapat pada aspek pemberdayaan, diikuti oleh aspek sosial dan ekonomi. Tingginya dampak pemberdayaan menunjukkan bahwa manfaat pengembangan pariwisata lebih cepat dirasakan melalui peningkatan keterlibatan, peran, dan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pariwisata dibandingkan melalui peningkatan ekonomi secara makro. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi unsur utama dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Sijunjung, sedangkan penguatan infrastruktur, tata kelola kebijakan, dan manfaat ekonomi masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kata kunci : Desa Wisata, Pengembangan Kawasan, Zonasi Wilayah Dan Dampak Pariwisata.

Abstract

This study examines the development of strategic areas of Tourism and its impact in Sijunjung Regency. The research is motivated by the not yet formed image of Sijunjung District as a strategic tourism area so that the benefits of its development have not been felt optimally. This study aims to describe the development of tourism strategic areas based on tourism components, zoning, and the development of tourism villages, as well as analyzing their impact on economic, social, and community empowerment aspects. The study used a mixed approach, namely qualitative and quantitative, involving 135 respondents. The results showed that the Sijunjung Tourism Strategic Area has a diverse tourist attraction, but still faces limited accessibility, directional facilities, public transportation, and supporting amenities. From a governance perspective, regional development requires strengthening policy coordination, destination management, and community involvement so that tourism development can run in an integrated and sustainable manner. Based on public perception, the highest impact is on empowerment aspects, followed by social and economic aspects. The high impact of empowerment shows that the benefits of Tourism Development are more quickly felt through increased involvement, role, and capacity of the community in tourism activities than through macroeconomic improvement. Thus, community empowerment is a key element in the development of the Sijunjung Tourism Strategic Area, while strengthening infrastructure, policy governance, and economic benefits still need to be improved sustainably.

Keywords: Rural Tourism, Area Development, Zoning And Tourism Impact.

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah merupakan upaya mengintegrasikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wilayah yang didasarkan pada potensi unggulan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan produktivitas masyarakat (Mahi, 2016). Dalam kerangka tersebut, sumber daya yang berupa keunikan geografis, lingkungan, sejarah, dan budaya lokal dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah (Friedman & Alonso, 2008).

Pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat karena dapat menimbulkan multiplier effect melalui perkembangan sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, kuliner, industri kreatif, dan berbagai aktivitas ekonomi pendukung lainnya (Abdurakhmanova, 2025; Zeng, 2021). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, melestarikan alam dan lingkungan, serta memajukan kebudayaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, pengembangan desa wisata diarahkan untuk mendorong terbentuknya desa wisata yang maju dan mandiri sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat setempat (Kemenparekraf, 2021).

Salah satu pendekatan dalam pengembangan pariwisata berbasis wilayah adalah pembentukan kawasan strategis pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata serta memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan, serta pertahanan dan keamanan. Pengembangan kawasan strategis pariwisata tidak cukup dilakukan melalui penetapan kawasan secara administratif, tetapi memerlukan integrasi antardaya tarik wisata, aksesibilitas, amenitas, pelayanan tambahan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Integrasi tersebut diperlukan untuk membentuk totalitas produk wisata yang saling terhubung, meningkatkan daya saing destinasi, dan mendorong terbentuknya aglomerasi ekonomi di wilayah pariwisata (Damayanti & Suprihardjo, 2016; Oktaviola & Idajati, 2024).

Kabupaten Sijunjung telah menetapkan Kecamatan Sijunjung sebagai kawasan strategis pariwisata melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Untuk menjaga konsistensi rujukan regulasi dalam penelitian ini, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 digunakan sebagai dasar kebijakan pada bagian pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Penetapan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan Kecamatan Sijunjung sebagai salah satu wilayah prioritas pengembangan pariwisata. Namun, implementasi kebijakan kawasan strategis pariwisata masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan perencanaan kawasan, pengembangan daya tarik wisata, penyediaan sarana pendukung, pengelolaan desa wisata, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan pelibatan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola dan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung (2025) menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 mencapai 245.401 wisatawan, melampaui target sebanyak 57.712 wisatawan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah. Kecamatan Sijunjung merupakan kecamatan dengan jumlah kunjungan wisatawan terbesar, yaitu mencapai 77,32% dari keseluruhan kunjungan wisatawan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024. Tingginya persentase tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata Kabupaten Sijunjung terkonsentrasi di Kecamatan Sijunjung. Secara kuantitatif, kondisi ini dapat dipandang sebagai indikator positif bagi perkembangan pariwisata daerah.

Meskipun demikian, peningkatan dan konsentrasi kunjungan wisatawan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan pengembangan kawasan strategis pariwisata. Fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa Kecamatan Sijunjung belum memiliki citra yang kuat sebagai tujuan wisata, khususnya bagi masyarakat dari luar Kabupaten Sijunjung. Selain itu, masih terdapat ketimpangan jumlah kunjungan antarobjek wisata, keterbatasan aksesibilitas dan transportasi umum, belum meratanya amenities, serta belum terintegrasinya pengelolaan antardestinasi dalam satu kesatuan kawasan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberhasilan kuantitatif yang ditunjukkan oleh tingginya angka kunjungan wisatawan dengan kualitas pengembangan kawasan dan manfaat pariwisata yang diterima masyarakat.

Kesenjangan lainnya terlihat pada belum optimalnya transformasi peningkatan kunjungan wisatawan menjadi dampak ekonomi secara lebih luas. Konsentrasi wisatawan pada objek tertentu berpotensi menyebabkan manfaat ekonomi juga terkonsentrasi pada kelompok usaha dan lokasi tertentu. Akibatnya, peningkatan kunjungan belum tentu secara otomatis menghasilkan pemerataan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, dan pertumbuhan usaha masyarakat pada seluruh wilayah kawasan. Penelitian Aziza dan Buchori (2020) menunjukkan bahwa penetapan kawasan strategis pariwisata belum tentu mampu menghasilkan dampak ekonomi yang optimal apabila tidak didukung oleh komponen pariwisata yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi kawasan strategis pariwisata tidak seharusnya hanya didasarkan pada jumlah kunjungan, tetapi juga pada keterhubungan antardestinasi, kualitas tata kelola, pemerataan manfaat, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata.

Penelitian terdahulu mengenai kawasan strategis pariwisata pada umumnya lebih banyak membahas ketersediaan komponen pariwisata, kesesuaian zonasi, daya saing destinasi, dan dampak ekonomi pengembangan kawasan. Kajian tersebut memberikan dasar penting dalam memahami pengembangan destinasi, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan analisis komponen pariwisata, zonasi wilayah, pengembangan desa wisata, tata kelola kebijakan, serta dampak ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka penelitian. Selain itu, tingginya jumlah kunjungan sering digunakan sebagai ukuran utama keberhasilan pengembangan pariwisata, padahal indikator tersebut belum dapat menggambarkan pemerataan manfaat dan perubahan kapasitas masyarakat secara menyeluruh.

Posisi penelitian ini terletak pada upaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengembangan kawasan strategis pariwisata secara lebih komprehensif. Analisis tidak hanya diarahkan pada kondisi daya tarik, aksesibilitas, amenities, dan pelayanan pendukung, tetapi juga mencakup zonasi kawasan, pengembangan desa wisata, implementasi kebijakan, serta dampak yang dirasakan masyarakat. Dampak tersebut dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan ini, keberhasilan pengembangan kawasan tidak semata-mata dinilai berdasarkan pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga berdasarkan kemampuan kebijakan pariwisata dalam membangun keterlibatan, kapasitas, dan kemandirian masyarakat lokal.

Keunikan model Kawasan Strategis Pariwisata Sijunjung dalam penelitian ini terletak pada adanya kombinasi antara konsentrasi kunjungan wisatawan yang tinggi, keragaman daya tarik wisata, pengembangan desa wisata, dan kuatnya potensi sosial budaya masyarakat setempat, tetapi belum diikuti oleh terbentuknya citra kawasan dan pemerataan manfaat ekonomi secara optimal. Berbeda dari kajian kawasan strategis pariwisata yang lebih menekankan pengembangan destinasi unggulan secara individual, penelitian ini memandang objek wisata dan desa wisata di Kecamatan Sijunjung sebagai satu kesatuan kawasan yang saling berhubungan. Dengan demikian, pengembangan kawasan diuji tidak hanya dari aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan tata kelola lokal dalam menghubungkan berbagai destinasi serta menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan pariwisata.

Dampak pariwisata pada dasarnya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Rohani & Purwoko, 2020; Adhiyaksa & Sukmawati, 2021). Dampak pemberdayaan dapat terlihat dari meningkatnya keterlibatan

masyarakat dalam pengelolaan destinasi, terbukanya kesempatan untuk mengembangkan usaha, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan, serta menguatnya peran masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Sijunjung berdasarkan komponen pariwisata, zonasi wilayah, pengembangan desa wisata, dan tata kelola kebijakan, serta menganalisis dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Sijunjung yang berada di Kecamatan Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Penentuan lokasi penelitian mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sijunjung. Peraturan tersebut digunakan secara konsisten sebagai dasar kebijakan dalam penelitian ini. Apabila Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 merupakan perubahan atau pengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, hubungan antara kedua peraturan tersebut dicantumkan sesuai dengan nomenklatur resmi yang terdapat dalam dokumen regulasi.

Penelitian menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan pertama, yaitu mendeskripsikan pengembangan kawasan strategis pariwisata berdasarkan komponen pariwisata, zonasi wilayah, pengembangan desa wisata, dan tata kelola kebijakan. Data kualitatif diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara itu, pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjawab tujuan kedua, yaitu menganalisis dampak pengembangan kawasan strategis pariwisata terhadap aspek ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat melalui survei menggunakan instrumen kuesioner (Abdullah dkk., 2022). Penggabungan kedua pendekatan dilakukan agar kondisi faktual pengembangan kawasan dapat dianalisis bersama dengan persepsi masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang terdiri atas Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Sijunjung, Wali Nagari Sijunjung, Wali Nagari Silokek, pengelola Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, dan pengelola Desa Wisata Geopark Silokek. Informan dipilih secara purposive berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan keterlibatannya dalam perencanaan maupun pengelolaan pariwisata. Kedua, observasi langsung pada objek wisata dan desa wisata untuk mengidentifikasi kondisi daya tarik, aksesibilitas, amenitas, zonasi, pengelolaan, serta keterhubungan antardestinasi. Ketiga, survei kuesioner kepada masyarakat untuk mengukur persepsi mengenai dampak ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Populasi penelitian adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Jorong Padang Ranah dan Jorong Tanah Bato, Nagari Sijunjung, serta Jorong Tanjung Medan dan Jorong Sangkiamo, Nagari Silokek. Populasi tersebut dipilih karena bertempat tinggal di sekitar desa wisata dan objek wisata yang menjadi bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sijunjung. Sampel penelitian berjumlah 135 responden yang terdiri atas masyarakat umum dan masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan pariwisata.

Pengambilan sampel dilakukan dengan mengombinasikan teknik *purposive sampling* dan *simple random sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih 42 responden yang memiliki usaha atau bekerja pada sektor pariwisata, seperti pengelola objek wisata, pelaku usaha kuliner, pedagang, penyedia jasa, dan pelaku usaha lain di sekitar destinasi. Kelompok tersebut dipilih karena dinilai memiliki pengalaman langsung dalam merasakan dampak pengembangan pariwisata. Selanjutnya, *simple random sampling* digunakan untuk memilih 93 responden masyarakat umum dari wilayah penelitian. Pemilihan secara acak dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada anggota masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai responden. Dengan demikian, keseluruhan sampel terdiri atas 42 responden yang dipilih

secara purposive dan 93 responden yang dipilih secara acak, sehingga total sampel penelitian berjumlah 135 responden.

Variabel untuk menjawab tujuan pertama mencakup tiga bagian. Pertama, komponen pariwisata yang terdiri atas daya tarik atau atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Kedua, zonasi wilayah yang meliputi zona inti, zona pendukung, dan zona terluar. Ketiga, pengembangan desa wisata yang mencakup proses penetapan, kelembagaan dan pengelolaan, sumber pendanaan, atraksi, aksesibilitas, serta amenitas. Analisis terhadap tujuan pertama juga memperhatikan tata kelola kebijakan, terutama koordinasi antarpemangku kepentingan, pelaksanaan kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan integrasi pengelolaan antardestinas.

Variabel untuk menjawab tujuan kedua meliputi kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta persepsi masyarakat mengenai dampak ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat (Sofianto, 2018; Nafisah & Sukarniati, 2015). Dampak ekonomi mencakup perubahan kesempatan kerja, peluang usaha, pendapatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak sosial mencakup interaksi sosial, pelestarian budaya, perubahan lingkungan sosial, dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata. Adapun dampak pemberdayaan mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, partisipasi, kapasitas berusaha, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan pariwisata.

Instrumen kuesioner untuk mengukur dampak ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat menggunakan Skala Likert lima tingkat. Setiap pernyataan diberi skor 1 sampai dengan 5, yaitu skor 1 untuk “sangat tidak setuju”, skor 2 untuk “tidak setuju”, skor 3 untuk “cukup setuju”, skor 4 untuk “setuju”, dan skor 5 untuk “sangat setuju”. Pernyataan dalam kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan positif sehingga skor yang lebih tinggi menunjukkan semakin kuatnya dampak pengembangan pariwisata yang dirasakan masyarakat. Skor dari seluruh responden pada setiap indikator dijumlahkan untuk memperoleh skor total. Selanjutnya, skor total dibandingkan dengan skor ideal dan dikonversikan ke dalam bentuk persentase dengan rumus:

$$[\text{Persentase dampak} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%]$$

Skor ideal diperoleh dari perkalian antara skor tertinggi pada Skala Likert, jumlah pernyataan, dan jumlah responden. Hasil persentase kemudian digunakan untuk menentukan tingkat dampak pengembangan pariwisata. Klasifikasi dampak dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu kurang berdampak, berdampak, dan sangat berdampak. Batas interval setiap kategori ditentukan berdasarkan rentang skor teoretis instrumen agar skor total, seperti skor 555, dapat ditelusuri sumber perhitungannya dan diinterpretasikan secara konsisten.

Data dianalisis melalui dua tahapan. Data hasil wawancara dan observasi dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses pengelompokan, penyajian, dan interpretasi data untuk menggambarkan pengembangan KSP berdasarkan komponen pariwisata, zonasi wilayah, pengembangan desa wisata, dan tata kelola kebijakan. Data hasil kuesioner dianalisis secara deskriptif kuantitatif melalui penghitungan skor, persentase, dan kategori dampak pengembangan pariwisata terhadap aspek ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Data PDRB dan PAD digunakan untuk menilai kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Kontribusi tersebut dianalisis menggunakan klasifikasi tingkat kontribusi menurut Bawazier (1999), yaitu relatif tidak berperan apabila kontribusinya kurang dari 1%, kurang berperan apabila kontribusinya 1–5%, cukup berperan apabila kontribusinya lebih dari 5–10%, berperan apabila kontribusinya lebih dari 10–20%, dan sangat berperan apabila kontribusinya lebih dari 20%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sijunjung

a. Komponen Pariwisata

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Sijunjung memiliki 29 objek wisata sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/502/KPTS-BUP-2023. Jumlah tersebut menempatkan Kecamatan Sijunjung sebagai wilayah dengan objek wisata terbanyak di Kabupaten Sijunjung, yaitu sebesar 41,42% dari keseluruhan 70 objek wisata. Berdasarkan jenisnya, objek wisata di KSP Sijunjung terdiri atas 19 wisata alam atau 65,52%, dua wisata budaya, empat wisata buatan, dua wisata sejarah, dan dua wisata religi. Dominasi wisata alam berkaitan dengan keberadaan kawasan Geopark Silokek yang memiliki keragaman bentang alam dan potensi geowisata.

Sebanyak 82,76% objek wisata di KSP Sijunjung dikelola oleh kelompok masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan kuatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi sekaligus mendukung salah satu kriteria kawasan strategis pariwisata, yaitu adanya kesiapan dan dukungan masyarakat. Dominasi pengelolaan berbasis kelompok masyarakat juga memperlihatkan bahwa karakter pengembangan pariwisata di KSP Sijunjung cenderung mengarah pada pendekatan *community-based tourism*. Namun, tingginya peran kelompok masyarakat perlu didukung oleh penguatan kelembagaan, pembagian kewenangan yang jelas, peningkatan kapasitas pengelola, pendampingan usaha, dan koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah.

Dari segi aksesibilitas, sebanyak 66,07% objek wisata di KSP Sijunjung harus ditempuh melalui jalan yang berkategori rusak berat. Hambatan tersebut diperkuat oleh minimnya rambu petunjuk arah menuju objek wisata dan belum tersedianya angkutan umum dengan trayek tetap yang melayani pergerakan wisatawan di dalam kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberagaman daya tarik wisata belum didukung oleh konektivitas yang memadai. Akibatnya, pergerakan wisatawan berpotensi terkonsentrasi pada objek yang mudah dijangkau, sedangkan objek lain yang memiliki daya tarik potensial belum memperoleh jumlah kunjungan secara optimal.

Kondisi aksesibilitas tersebut tidak sejalan dengan pernyataan Oktaviola dan Idajati (2024) bahwa akses yang baik memberikan kemudahan kepada wisatawan dan dapat meningkatkan minat kunjungan. Fatmasari dkk. (2023) juga menyebutkan bahwa infrastruktur dan aksesibilitas transportasi merupakan prasyarat penting dalam pembangunan ekonomi daerah serta menjadi salah satu pertimbangan wisatawan dalam menentukan destinasi. Oleh karena itu, penyediaan akses tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan menuju objek wisata, tetapi juga perlu diarahkan pada pembentukan jaringan perjalanan yang menghubungkan objek wisata, desa wisata, pusat pelayanan, akomodasi, dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Dari segi amenitas, KSP Sijunjung memiliki 65 rumah makan atau restoran. Namun, sebagian besar fasilitas tersebut terkonsentrasi di pusat kota Nagari Muaro, sedangkan keberadaan rumah makan di Nagari Silokek, Nagari Durian Gadang, dan Nagari Aie Angek masih terbatas. Ketimpangan distribusi amenitas dapat menyebabkan pengeluaran wisatawan lebih banyak terkonsentrasi di pusat pelayanan tertentu dan belum menyebar secara merata ke nagari yang memiliki objek wisata.

Pada tahun 2024, fasilitas akomodasi di KSP Sijunjung tercatat sebanyak 13 unit dengan kapasitas 189 kamar dan 549 tempat tidur. Jumlah tersebut masih berada di bawah estimasi kebutuhan ideal sebanyak 612 kamar berdasarkan perhitungan Baud dan Lawson (1998) untuk melayani 189.755 wisatawan. Meskipun demikian, kekurangan kamar tidak hanya perlu ditanggapi melalui pembangunan hotel atau akomodasi berskala besar, tetapi juga dapat diarahkan pada penguatan *homestay* yang dikelola masyarakat. Pengembangan *homestay* dapat memperluas manfaat ekonomi di tingkat lokal sekaligus memberikan pengalaman tinggal yang berkaitan dengan budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan Fatimah dkk. (2023) yang menyatakan bahwa fasilitas makanan dan minuman dapat menjadi daya tarik tambahan, terutama jika menyajikan kuliner khas daerah.

b. Zonasi Wilayah

Berdasarkan analisis sebaran objek wisata, jaringan jalan, konsentrasi amenitas, dan lokasi akomodasi, penelitian ini merekomendasikan pembagian wilayah pengembangan KSP Sijunjung ke dalam tiga zona. Pertama, zona inti terletak pada sebagian wilayah Nagari Muaro menuju Nagari Silokek karena memiliki konsentrasi objek wisata yang relatif tinggi dan menjadi jalur utama menuju daya tarik geowisata. Kedua, zona pendukung diarahkan pada sebagian wilayah Nagari Muaro menuju Nagari Sijunjung yang berperan sebagai pusat pelayanan wisatawan, penyedia amenitas, dan penghubung antara wisata alam dengan wisata budaya. Ketiga, zona terluar meliputi Nagari Pematang Panjang, Nagari Sijunjung, Nagari Kandang Baru, dan Nagari Durian Gadang, yang diarahkan sebagai wilayah perluasan dan penyebaran aktivitas pariwisata.

Pembagian tersebut menggunakan prinsip *the value of time*, yaitu mengoptimalkan waktu perjalanan agar wisatawan dapat mengunjungi dan menikmati lebih banyak daya tarik dalam satu rangkaian perjalanan (Rahmayanti dkk., 2022). Dengan pendekatan tersebut, zonasi tidak hanya menunjukkan pembagian ruang secara geografis, tetapi juga membentuk hubungan fungsional antartujuan. Zona inti berfungsi sebagai konsentrasi daya tarik utama, zona pendukung menyediakan pelayanan dan fasilitas bagi wisatawan, sedangkan zona terluar berfungsi sebagai wilayah pengembangan baru untuk mengurangi konsentrasi kunjungan pada objek tertentu.

Rekomendasi zonasi dalam penelitian ini bukan dimaksudkan sebagai penetapan zonasi formal yang menggantikan kewenangan pemerintah daerah. Zonasi tersebut merupakan hasil analisis akademik yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan pariwisata daerah. Oleh karena itu, penerapannya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Kesesuaian tersebut penting agar pengembangan fasilitas pariwisata tidak bertentangan dengan peruntukan ruang, kawasan lindung, daya dukung lingkungan, mitigasi bencana, kawasan permukiman, dan rencana pembangunan jaringan transportasi.

Secara substantif, rekomendasi zonasi ini memperkuat arah kebijakan pemerintah daerah yang telah menetapkan Kecamatan Sijunjung sebagai kawasan strategis pariwisata. Namun, rekomendasi tersebut juga memberikan koreksi terhadap pola pengembangan yang masih cenderung melihat objek wisata secara terpisah. Penelitian ini menawarkan pengelolaan berbasis keterhubungan kawasan, yaitu dengan mengintegrasikan objek wisata alam di Silokek, pusat pelayanan di Muaro, wisata budaya di Nagari Sijunjung, dan objek potensial pada zona terluar dalam satu jaringan perjalanan wisata.

Meskipun demikian, kepastian apakah rekomendasi zona inti, pendukung, dan terluar sudah sepenuhnya selaras dengan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Sijunjung perlu ditentukan melalui proses tumpang susun atau overlay peta rekomendasi penelitian dengan peta pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW yang berlaku. Tanpa analisis tersebut, rekomendasi ini belum dapat dinyatakan sebagai zonasi formal. Dengan demikian, posisi rekomendasi penelitian adalah sebagai alternatif penyempurnaan operasional pengembangan KSP, bukan sebagai pengganti kebijakan tata ruang daerah.

c. Pengembangan Desa Wisata

Dari enam nagari wisata yang terdapat di KSP Sijunjung, penelitian ini berfokus pada dua desa wisata utama, yaitu Nagari Wisata Silokek dan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. Secara umum, pengembangan kedua nagari wisata tersebut telah memenuhi sebagian indikator pengembangan desa wisata sebagaimana termuat dalam Panduan Desa Wisata Kemenparekraf (2021), terutama dalam hal keberadaan daya tarik, kelembagaan pengelola, keterlibatan masyarakat, dan pengembangan aktivitas wisata.

Nagari Wisata Silokek mengembangkan paket wisata berbasis alam dan geowisata dengan dukungan kelompok sadar wisata yang aktif. Kekuatan utama Nagari Silokek terletak pada potensi bentang alam, keragaman geologi, dan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan layanan wisata. Namun, pengembangannya masih menghadapi keterbatasan pada kondisi jalan,

toilet umum, jaringan telekomunikasi, dan pemerataan amenities. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi kenyamanan wisatawan dan menghambat perluasan manfaat ekonomi kepada pelaku usaha lokal.

Perkampungan Adat Nagari Sijunjung menempatkan rumah gadang, tradisi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat sebagai daya tarik utama. Pengembangan wisata budaya tersebut dapat memperkuat upaya pelestarian warisan lokal sekaligus membangun kebanggaan masyarakat terhadap identitas budaya. Namun, kawasan ini masih memerlukan pengembangan moda transportasi lokal, toilet umum, tempat parkir, serta penataan aktivitas wisata agar peningkatan kunjungan tidak mengurangi nilai budaya dan fungsi sosial Perkampungan Adat.

Kedua desa wisata menunjukkan karakter pengembangan berbasis masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga berperan sebagai pengelola destinasi, pengelola homestay, pemandu wisata, pelaku usaha, dan anggota kelompok sadar wisata. Model tersebut merupakan kekuatan utama pengembangan KSP Sijunjung, tetapi membutuhkan dukungan tata kelola pemerintah dalam bentuk penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, standardisasi pelayanan, promosi terpadu, bantuan infrastruktur, dan pengembangan jaringan pemasaran.

2. Dampak Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata

a. Dampak Ekonomi

Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sijunjung menunjukkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi rata-rata sebesar 12,73% terhadap PDRB selama tahun 2017–2024. Berdasarkan klasifikasi Bawazier (1999), persentase tersebut termasuk kategori berperan, bukan sangat berperan. Sektor Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 7,53%, sehingga termasuk kategori cukup berperan. Sementara itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,69% dan termasuk kategori relatif tidak berperan.

Kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Sijunjung juga relatif rendah. Selama tahun 2020–2024, rata-rata kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD hanya sebesar 0,08%. Berdasarkan klasifikasi Bawazier (1999), kontribusi tersebut termasuk kategori relatif tidak berperan. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas dan kunjungan wisatawan belum menghasilkan penerimaan langsung yang signifikan bagi kas pemerintah daerah.

Pada tingkat rumah tangga, pariwisata belum mampu menggeser pekerjaan utama masyarakat karena tidak terdapat responden yang menjadikan sektor pariwisata sebagai pekerjaan utama. Namun, sebanyak 47,4% responden memiliki pekerjaan sampingan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Jenis pekerjaan sampingan tersebut antara lain pengelola homestay sebesar 43,8%, pengelola destinasi atau anggota pokdarwis sebesar 28,1%, dan pemandu wisata sebesar 14,1%. Sebanyak 59,4% responden yang memiliki pekerjaan sampingan memperoleh tambahan penghasilan antara Rp0 sampai dengan Rp700.000 per bulan. Selain itu, sebanyak 71,4% dari 42 responden pelaku usaha menyatakan mengalami peningkatan omzet akibat kegiatan pariwisata.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara dampak ekonomi pada tingkat makro dan dampak ekonomi pada tingkat mikro. Pada tingkat makro, kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD dan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB masih rendah. Sebaliknya, pada tingkat mikro, masyarakat merasakan terbukanya pekerjaan sampingan, peningkatan omzet, dan tambahan pendapatan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi pariwisata di KSP Sijunjung lebih banyak berlangsung melalui transaksi langsung antara wisatawan dan masyarakat daripada melalui penerimaan fiskal pemerintah daerah.

Kondisi tersebut berkaitan dengan karakter pengelolaan objek wisata di KSP Sijunjung yang sebagian besar berbasis kelompok masyarakat. Sebanyak 82,76% objek wisata dikelola oleh kelompok masyarakat, sehingga sebagian penerimaan dari kegiatan wisata berpotensi dikelola dan digunakan pada tingkat komunitas. Pengeluaran wisatawan untuk homestay, jasa

pemandu, makanan, transportasi lokal, parkir, dan produk masyarakat dapat meningkatkan omzet pelaku usaha tanpa seluruh transaksi tersebut tercatat sebagai retribusi pariwisata atau masuk secara langsung ke dalam kas daerah.

Rendahnya kontribusi retribusi terhadap PAD, dengan demikian, tidak serta-merta menunjukkan bahwa pariwisata tidak memberikan manfaat ekonomi. Data tersebut lebih tepat dimaknai bahwa manfaat ekonomi belum sepenuhnya dikonversi menjadi penerimaan daerah. Retribusi hanya merekam penerimaan yang dipungut melalui objek dan mekanisme resmi pemerintah daerah, sedangkan perputaran uang yang terjadi pada homestay, warung, jasa pemandu, penjualan produk lokal, dan usaha masyarakat tercatat sebagai pendapatan masyarakat atau omzet usaha.

Kesenjangan ini menghasilkan dua implikasi kebijakan. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pencatatan aktivitas ekonomi pariwisata agar kontribusi sektor tersebut dapat diukur secara lebih menyeluruh dan tidak hanya melalui retribusi objek wisata. Kedua, optimalisasi PAD hendaknya tidak dilakukan melalui pembebanan retribusi yang berlebihan kepada kelompok masyarakat karena dapat mengurangi insentif pengelolaan berbasis komunitas. Kebijakan yang diperlukan adalah tata kelola penerimaan yang transparan, proporsional, dan memberikan pembagian manfaat yang jelas antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, kelompok pengelola, dan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan Adhiyaksa dan Sukmawati (2021) bahwa pariwisata dapat membuka peluang mata pencaharian baru tanpa menggantikan pekerjaan utama masyarakat. Akan tetapi, tambahan pendapatan yang sebagian besar masih berada pada rentang Rp0–Rp700.000 per bulan menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata belum menjadi sumber penghidupan utama. Dengan demikian, dampak ekonomi KSP Sijunjung lebih tepat dipahami sebagai ekonomi tambahan berbasis rumah tangga dan komunitas, bukan sebagai transformasi struktur pekerjaan masyarakat secara menyeluruh.

b. Dampak Sosial

Persepsi masyarakat terhadap dampak sosial pariwisata memperoleh total skor 3.745 dan berada dalam klasifikasi sangat berdampak. Indikator dengan skor tertinggi adalah pernyataan bahwa pariwisata mendorong pelestarian tradisi dan adat istiadat lokal dengan skor 555. Selanjutnya, pariwisata memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap budaya lokal memperoleh skor 552, sedangkan kehadiran wisatawan mempererat hubungan antarwarga memperoleh skor 551.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memandang pariwisata sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan identitas budaya. Keberadaan aktivitas wisata memberikan alasan tambahan bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi, menjaga rumah gadang, mempertahankan adat istiadat, dan memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan. Temuan ini sejalan dengan Rohani dan Purwoko (2020), yang menemukan bahwa pariwisata di Desa Ekowisata Pampang lebih banyak memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Namun, penguatan pelestarian budaya tetap memerlukan tata kelola agar budaya lokal tidak hanya diposisikan sebagai komoditas pertunjukan. Keterlibatan tokoh adat, masyarakat, generasi muda, dan pemerintah nagari diperlukan untuk menjaga kesesuaian penyajian atraksi dengan nilai dan aturan adat yang berlaku.

c. Dampak Pemberdayaan Masyarakat

Aspek pemberdayaan masyarakat mendapatkan total skor 2.617 dengan klasifikasi sangat berdampak, menjadi aspek yang paling menonjol di antara ketiga dimensi dampak. Indikator dengan skor tertinggi adalah program pelatihan pariwisata mampu meningkatkan keterampilan masyarakat (skor 535), diikuti oleh masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata (skor 530) dan pariwisata meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk mengembangkan usaha sendiri (skor 523). Temuan ini mengkonfirmasi bahwa dalam pariwisata berbasis masyarakat, pemberdayaan lebih dahulu dirasakan sebelum dampak ekonomi, sebagaimana disebutkan oleh Rohani dan Purwoko (2020).

Secara keseluruhan, ketiga aspek dampak menunjukkan klasifikasi sangat berdampak. Urutan dampak dari tertinggi ke terendah adalah: aspek pemberdayaan masyarakat, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Kondisi ini wajar mengingat pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) yang menjadi ciri khas KSP Sijunjung cenderung mengutamakan penguatan kapasitas masyarakat sebelum mendatangkan manfaat ekonomi yang signifikan (Nafisah & Sukarniati, 2015).

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, KSP Kabupaten Sijunjung memiliki daya tarik wisata yang beragam meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, dan wisata buatan. Namun dari segi aksesibilitas dan amenitas, KSP Sijunjung masih memiliki kekurangan signifikan, yaitu 66,07% objek wisata harus melalui jalan rusak berat, minimnya rambu petunjuk jalan, belum tersedianya angkutan umum trayek tetap, dan terbatasnya keberadaan rumah makan di beberapa titik wisata. Dari analisis zonasi, zona inti diarahkan ke Nagari Muaro-Silokek, zona pendukung ke Nagari Muaro-Sijunjung, dan zona terluar meliputi Nagari Pematang Panjang, Nagari Sijunjung, Nagari Kandang Baru, dan Nagari Durian Gadang.

Kedua, dampak pengembangan KSP Sijunjung terhadap aspek ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan terklasifikasi sangat berdampak. Aspek pemberdayaan masyarakat menjadi yang tertinggi, ditandai dengan peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan pariwisata. Aspek sosial menonjol dengan adanya dorongan pelestarian tradisi dan adat istiadat lokal. Aspek ekonomi, meskipun terklasifikasi sangat berdampak berdasarkan persepsi masyarakat, namun secara makro kontribusi sektor akomodasi dan retribusi pariwisata terhadap PDRB dan PAD masih tergolong tidak berperan.

SARAN

Pertama, Pemerintah Kabupaten Sijunjung perlu membentuk dan melegalisasi Forum Tata Kelola Pariwisata Lintas Nagari melalui keputusan bupati atau regulasi lain sesuai kewenangan daerah. Forum ini perlu melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, pemerintah nagari, kelompok sadar wisata, pengelola destinasi, pelaku usaha, dan lembaga adat. Forum tersebut bertugas mengoordinasikan pengembangan antarobjek wisata, menyusun kalender kegiatan bersama, mengintegrasikan promosi, dan membangun paket wisata terpadu yang menghubungkan objek wisata pada koridor Muaro-Sijunjung-Silokek. Paket wisata perlu dilengkapi dengan rute perjalanan, jadwal, tarif, titik singgah, moda transportasi lokal, dan mekanisme pembagian manfaat yang jelas antarpengelola.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Sijunjung perlu menerapkan digitalisasi pencatatan kunjungan dan penerimaan pariwisata, termasuk penggunaan sistem *e-ticketing*, secara bertahap pada 29 objek wisata. Penerapannya dapat diawali pada objek wisata yang memiliki jumlah kunjungan tinggi, kelembagaan pengelola yang aktif, dan jaringan telekomunikasi yang memadai. Sistem tersebut perlu mengintegrasikan data jumlah pengunjung, tarif masuk, penerimaan objek wisata, dan pembagian pendapatan antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, serta kelompok pengelola. Pada objek wisata dengan keterbatasan jaringan, pencatatan dapat dilakukan secara luring menggunakan format yang seragam dan disinkronkan secara berkala. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kebocoran penerimaan, serta memperkuat kontribusi pariwisata terhadap PAD tanpa mengurangi manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Ketiga, penelitian selanjutnya perlu mengevaluasi dampak lingkungan dan distribusi manfaat ekonomi pada seluruh 29 objek wisata dan enam desa wisata di KSP Sijunjung. Evaluasi ekonomi perlu membandingkan jumlah kunjungan, penerimaan tiket, retribusi daerah, pendapatan kelompok pengelola, omzet pelaku usaha, dan tambahan pendapatan masyarakat. Penelitian berikutnya juga perlu mengkaji daya dukung lingkungan, pengelolaan sampah, perubahan penggunaan lahan, dan tekanan aktivitas wisata terhadap kawasan alam dan budaya.

Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan KSP yang lebih terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemerataan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurakhmanova, A. (2025). The economic and social impacts of ecotourism on local employment and income: A case study of rural Samarkand, Uzbekistan. *Regional Science Policy & Practice*, 17(3). <https://doi.org/10.1016/j.rsp.2025.100180>
- Adhiyaksa, M., & Sukmawati, A. M. A. (2021). Dampak wisata bahari bagi kondisi ekonomi masyarakat Desa Kolorai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. *UNIPLAN: Journal of Urban and Regional Planning*, 2(2), 7–18.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Aziza, Z. R., & Buchori, I. (2020). Kajian perkembangan pariwisata Kabupaten Cilacap sebagai kawasan strategis pariwisata Provinsi Jawa Tengah. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 9(4), 274–283.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung. (2025). *Kabupaten Sijunjung dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung.
- Baud-Bovy, M., & Lawson, F. (1998). *Tourism and recreation handbook of planning and design*. Architectural Press.
- Bawazier, F. (1999). *Peran dan strategi keuangan di daerah*. Gramedia.
- Damayanti, S. N., & Suprihardjo, R. (2016). Pembentukan *cluster* objek daya tarik wisata (ODTW) di Kota Yogyakarta. *Jurnal Teknik ITS*, 5(1).
- Fatmasari, B. R., Harahap, A., Navratilova, A., Andjanie, I., & Annisa, L. (2023). Analisis perkembangan infrastruktur pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2).
- Friedman, J., & Alonso, W. (2008). *Regional development planning: A reader*. Geografer.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Buku pedoman desa wisata*. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
- Mahi, A. K. (2016). *Pengembangan wilayah: Teori dan aplikasi*. Kencana.
- Nafisah, E. F., & Sukarniati, L. (2015). Dampak perkembangan pariwisata Kabupaten Gunungkidul terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 13(2), 105–115.
- Oktaviola, V. S., & Idajati, H. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan integrasi pariwisata pada kawasan Pantai Kenjeran, Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 13(1), C16–C21.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017–2025.
- Rahmayanti, C., Patandianan, M. V., & Ekawati, S. A. (2022). Arah pengembangan kawasan pariwisata terpadu di Pulau Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Wilayah & Kota Maritim*, 10(1).
- Rohani, E. D., & Purwoko, Y. (2020). Dampak sosial pariwisata terhadap masyarakat Desa Ekowisata Pampang Gunung Kidul menuju desa ekowisata berkelanjutan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 237–254.



Sofianto, A. (2018). Strategi pengembangan kawasan pariwisata nasional Borobudur. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 16(1), 27–44.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Zeng, Z. (2021). Effects of domestic tourism on urban-rural income inequality: Evidence from China. *Sustainability*, 13(16), Article 9009. <https://doi.org/10.3390/su13169009>